

## HUBUNGAN PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DAN PENDAPATAN USAHA MIKRO PADA MASYARAKAT KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG

Nugrahini Kusumawati<sup>1</sup>, Sri Maryati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

Email:innanugrahini@gmail.com, sri\_maryati93@yahoo.com

### Abstract

*Community empowerment is closely related to the response to development issues, such as unemployment, poverty and inequality. Poverty reduction policies are not separated from the context of community development. PNPM Mandiri is one of the government programs in an effort to accelerate poverty reduction, where one of the activities in which is the development of microfinance managed by UPK (Unit Pengelola Kegiatan) in the field of Productive Economic Business or UEP (Usaha Ekonomi Produktif) in the Woman's Cooperative Finance or we called SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). This study aims to determine: 1) women's credit financing activities (SPP) in Pamarayan sub-district. 2) the income micro-enterprises in communities in Pamarayan sub-district and 3) the relation between the women's credit financing activities (SPP) towards community micro business income Pamarayan Serang District. The method used in this research is descriptive method with correlations. This method is used to prove the presence or absence of the influence of the issues examined in the group of women's cooperative finance (SPP) in Pamarayan-Serang District. The population in this study is members of the SPP PNPM Mandiri Pamarayan who has a business. Total population in this study was 100 people from 10 groups, and samples taken as many as 50 members. The sampling technique used is proportional random sampling. Data collected by questionnaires, Data were analyzed using Statistical Analysis with SPSS version 20. The results showed that significant numbers tcount 5.924 higher than ttable 1,675 give the effect that the meaning is significant.*

**Keywords:** Cooperative Financing SPP, public micro business income

### Abstrak

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan respons terhadap isu-isu pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak lepas dari konteks pembangunan masyarakat. PNPM Mandiri merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, dimana salah satu kegiatan di dalamnya adalah pengembangan keuangan mikro yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di bidang Usaha Ekonomi Produktif atau UEP (Usaha Produktif Ekonomi) di Keuangan Koperasi Perempuan atau yang kami sebut SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) kegiatan pembiayaan kredit perempuan (SPP) di kecamatan Pamarayan. 2) pendapatan usaha mikro di masyarakat di kecamatan Pamarayan dan 3) hubungan kegiatan pembiayaan kredit perempuan (SPP) terhadap pendapatan bisnis mikro masyarakat Pamarayan Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan korelasi. Metode ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh isu-isu yang dikaji dalam kelompok keuangan koperasi perempuan (SPP) di Kabupaten Pamarayan-Serang. Warga dalam penelitian ini adalah anggota SPP PNPM Mandiri Pamarayan yang memiliki usaha. Total populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang dari 10 kelompok, dan sampel yang diambil sebanyak 50 anggota. Teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. Data yang dikumpulkan oleh kuesioner, Data dianalisis menggunakan Analisis Statistik dengan SPSS versi 20. Hasilnya menunjukkan bahwa angka signifikan tcount 5.924 lebih tinggi dari ttable 1.675 memberikan efek bahwa maknanya signifikan.

**Kata kunci:** SPP Pembiayaan Koperasi, pendapatan usaha mikro publik

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus diakui sebagai kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pembangunan daerah, oleh karena pertumbuhan Usaha Mikro kecil dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan, dimana nilai output industri mikro dan kecil untuk Provinsi Banten dan kontribusinya yaitu:

Tabel . Nilai *Output* Industri Mikro dan Kecil  
Provinsi Banten 2012 – 2015 (dalam juta  
Rupiah)

	2013	2014	2015
Provinsi	6.000.4	11.464.7	25.204.
Banten	19	74	272
Indonesia	489.86	513.309.	570.366
	1.304	953	.901
Kontribusi	1.22%	2.23%	4.42%

Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa perkembangan nilai *output* dari industri mikro dan kecil di Provinsi Banten dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan. Termasuk juga dalam hal kontribusi terhadap nilai output industri mikro dan kecil di Indonesia juga mengalami peningkatan. Namun dalam hal nilai kontribusi Provinsi Banten belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap nilai output industri mikro dan kecil di Indonesia. Pada tahun 2013 nilai output industri mikro dan kecil Provinsi Banten hanya memberikan kontribusi 1,22% bagi Indonesia. Kemudian tahun 2014 dan tahun 2015 hanya 2.23% dan 4.42%.

Usaha berskala mikro, kecil dan menengah dalam arti yang sempit seringkali dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dan atau *assets* yang relatif kecil. Bila hanya komponen ini dijadikan sebagai patokan dalam menentukan besar kecilnya skala usaha maka banyak bias yang terjadi, sebagai contoh sebuah perusahaan yang memperkejakan 50 orang karyawan di Amerika Serikat di kategorikan sebagai perusahaan kecil (relatif terhadap ukuran ekonomi Amerika Serikat). Sementara itu untuk ukuran yang sama, sebuah perusahaan di Bolivia tidak lagi masuk dalam kategori usaha kecil.

Dengan demikian, diperlukan komponen atau karakteristik lain dalam melakukan penilaian ukuran usaha, misalnya dengan melihat tingkat informalitas usaha dengan berdasarkan kepada dokumen-dokumen usaha yang dimiliki, tingkat kerumitan teknologi yang digunakan, padat karya dan lain sebagainya. Menurut Badan Pusat Statistik yang dikategorikan sebagai Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang. Sedangkan Industri Kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang.

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Berdasarkan fenomena di atas maka salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan usaha kecil menengah adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bentuk-bentuk kegiatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Pamarayan adalah program peningkatan kualitas hidup (PKH) melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan, pembangunan fisik sarana dan prasarana, serta pemberian bantuan pinjaman modal usaha melalui Unit Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang penyaluran dana yang diberikan kepada kelompok masyarakat di desa. Seperti yang biasa terjadi dalam berbagai macam program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam proses pelaksanaan program.

Banyak penelitian yang dilakukan pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Namun dari masing-masing penelitian memiliki hasil yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sartika menyebutkan bahwa melalui pemberian pinjaman dana bergulir yang didapat sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- anggota dapat melanjutkan keberlangsungan usahanya yang sebelumnya mengalami kesulitan pada permodalan sehingga tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga oleh perempuan dapat tercapai melalui indikator : a) Terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak dengan hasil 100% b) mampu menyekolahkan anak dengan hasil 80%, c) mampu membuka wirausaha mandiri sebanyak 80% dan 20% (Arum S.L, 2012). Sedang penelitian yang dilakukan oleh Yan Handrey dan Made Kembar menyebutkan bahwa Program PNPM ini merupakan sebuah terobosan yang terbilang berhasil di mata masyarakat. Oleh karena itu disarankan agar kesinambungan program ini tetap dijaga dan dijamin oleh pemerintah, dan kelompok-kelompok SPP yang sudah terbentuk terus dibina agar tetap produktif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum (KusmeiranY.H, Sri Budhi M.K, 2014)

Pada beberapa kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Pamarayan, khususnya kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) terjadi beberapa masalah yang timbul, antara lain ketidaktepatan sasaran dari kegiatan SPP. Sebagian masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal tidak menggunakan dana pinjaman untuk modal usaha, bahkan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa terjadi ketidak maksimalan dalam penggunaan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, namun banyak anggota SPP yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan lain seperti kegiatan konsumsi maupun keperluan rumah tangga yang lain

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Pendapatan Usaha Mikro

Usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

Untuk mengatur agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha dan untuk menghadapi perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global maka pemerintah mengganti Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008.

Menurut Nadiah, Widyastutik dan Ranti, usaha mikro memiliki peran dalam perkembangan ekonomi nasional (Hidayati N.*et al*) namun, pelaku usaha mikro menghadapi permasalahan yaitu keterbatasan modal. Dari segi pencatatan keuangan, aturannya telah jelas diatur dalam pasal 16 sampai 19 UU No. 20 tahun 2008 dengan meningkatkan kemampuan manajerial.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia menggalakkan lembaga yang ada untuk melakukan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial teknik produksi, mutu produk, pelayanan, desain teknologi, sumberdaya manusia dan pemasaran.

Mikro kredit memiliki dua dampak utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan peluang usaha/kerja. Dengan asumsi kredit yang diberikan dapat digunakan untuk membangun atau mengembangkan suatu usaha yang produktif maka masyarakat yang menerima kredit tersebut akan memiliki kesempatan bekerja lebih banyak sehingga pendapatannya akan meningkat Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan peluang usaha atau kerja pada akhirnya akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Yang dimaksud dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (Sumarno.N.T, 2013) adalah sebagai berikut:

Usaha mikro. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah. Usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik, batasan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu Usaha mikro memiliki pekerja kurang dari 5 orang, termasuk tambahan anggota keluarga yang tidak dibayar. Usaha kecil memiliki pekerja 5 sampai 19 orang. Usaha Menengah memiliki pekerja 19 sampai 99 orang.

#### **Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan**

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini merupakan program hasil korektif dari program terdahulu seperti P3DT dan IDT. Mulai tahun 2007 PNPM-MP mengalami beberapa penyempurnaan, untuk mendukung efektivitas realisasi prinsip-prinsip PNPM-MP dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun 2008.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya program PNPM-MP memberi bantuan berupa fisik maupun non fisik di desa-desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung Pos Kesehatan Desa (PKD), pasar desa, talud, irigasi, pemberian pinjaman, pelatihan keterampilan, modal usaha produktif dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar (PNPM, 2010).

Untuk tataran nasional PNPM-MP telah berhasil menyediakan lapangan kerja sekaligus menambah penghasilan bagi masyarakat miskin, bahkan telah memperhatikan masalah kesetaraan gender dengan menambah satu kegiatan khusus untuk kelompok perempuan, yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Salah satu bentuk keikutsertaan kelompok perempuan terdapat pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Perdesaan, yang bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha, khususnya bagi rumah tangga miskin (RTM). Dengan diberikannya tambahan modal usaha, diharapkan rumah tangga miskin (RTM) dapat meningkatkan usahanya yang nantinya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Menurut Muhammad Syukri keberhasilan Kegiatan

SPP diharapkan akan membawa dampak yang maksimal bagi peningkatan pendapatan keluarga (Syukroni, 2010).

Dengan upaya memberdayakan kelompok perempuan yang nantinya akan menambah pendapatan bagi keluarganya sehingga meningkatkan taraf hidup keluarganya dan tercapailah kesejahteraan sosial keluarga tersebut. Selain itu tujuan utama dari program PNPM-MP untuk mengurangi jumlah (Rumah Tangga Miskin) RTM akan tercapai dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga RTM.

Pelaksanaan kegiatan SPP pada Desa Paseyan, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban berdasarkan survei awal ditemukan bahwa pelaksanaan program SPP membawa pengaruh bagi peningkatan pendapatan keluarga, anggota SPP. Dengan dilaksanakannya kegiatan SPP, warga perempuan yang dulunya mayoritas menjadi ibu rumah tangga sekarang ini banyak yang menekuni berbagai aktifitas pekerjaan. Selain itu bagi yang sudah mempunyai usaha semakin mengembangkan usahanya dengan modal usaha yang didapat dari kegiatan SPP.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Zahrotun Nihayah diperoleh hasil Pemberian pinjaman pada program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan memberikan pengaruh terhadap perubahan pendapatan Usaha Mikro Kecil. Hasil uji pangkat tanda Wilcoxon menjelaskan bahwa pada nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai asimetris untuk ujian dua arah adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak, hal ini mengandung arti bahwa adanya perubahan yang signifikan terhadap pendapatan sebelum pinjaman dana SPP pada nasabah dengan pendapatan sesudah pinjaman SPP (Nihayah ZA, 2015)

Pelaksanaan kegiatan SPP yang merupakan kegiatan di bidang ekonomi, disambut baik oleh kelompok perempuan di Desa Paseyan. Adanya kegiatan tersebut dianggap sangat membantu peningkatan perekonomian keluarga anggota. Kegiatan SPP di Desa Paseyan berdiri mulai tahun 2009 dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik disertai dengan berbagai kemajuan, serta didukung dengan semakin bertambahnya jumlah anggota SPP yang mendapatkan dana bantuan modal usaha. Ditetapkannya PNPM-SPP pada suatu desa diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian keluarga ditengah era globalisasi.

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian pinjaman modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Seperti halnya instrument hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang asset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).

Tujuan Umum SPP Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pedanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan Khusus SPP Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha. Serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) (Syukri M *et al*, 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

- 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu teori dalam Sekaran, yaitu metode deskriptif kuantitatif (Sekaran U, 2002). Metode ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh masalah yang diteliti pada kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang jelas, apakah terdapat pengaruh yang positif dalam Pembiayaan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan terhadap Pendapatan Usaha Mikro pada Masyarakat Kecamatan Pamarayan.

Adapun jenis instrument penelitian yang digunakan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket kuesioner, lembar angket yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah lembar anket kuesioner tertutup, yaitu angket melalui pernyataan atau pertanyaan.

Dilihat dari berbagai pendekatan yang ada, dalam penelitian ini untuk mengetahui pendapatan dari masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) terutama yang tergabung dalam kelompok kegiatan SPP program PNPM Mandiri di Kecamatan Pamarayan, peneliti menggunakan pendekatan pendapatan, karena dengan pendekatan pendapatan peneliti mampu mengumpulkan data pendapatan dari anggota kelompok yang tergabung dalam kegiatan SPP.

Penelitian ini menggunakan skala Likert, hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono bahwa: Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2004)

Sesuai dengan tujuan dan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan hipotesis yang di ajukan yaitu:

Ha: Terdapat hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dan Pendapatan Usaha Mikro pada masyarakat Kecamatan Pamarayan.

Ho: Tidak terdapat hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dan Pendapatan Usaha Mikro pada masyarakat Kecamatan Pamarayan. Jika setelah diadakan penghitungan terhadap nilai variabel x dan nilai variabel y terdapat hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dan Pendapatan Usaha Mikro pada masyarakat Kecamatan Pamarayan, maka Ha diterima. Namun sebaliknya jika tidak terdapat pengaruh, maka Ho ditolak.

#### HASIL DAN DISKUSI

Hasil pengolahan data selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dan menjawab hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana untuk menentukan Hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dan Pendapatan Usaha Mikro di Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.

Tabel 2. Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8.391	17.263		.48	.629
Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan	1.086	.183	.650	5.9	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Usaha Mikro

Persamaan garis regresi Hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dengan Pendapatan Usaha Mikro dapat dinyatakan dengan  $Y = -8,391 + 1,086x$ . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien x sebesar 1,086 yang berarti apabila Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (x) meningkat 1 satuan maka Pendapatan Usaha Mikro (y) akan meningkat 1,086 poin.

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai thitung adalah  $t = 5,924$  selanjutnya dibandingkan dengan nilai pada ttabel. Untuk kesalahan 5% diketahui t tabel adalah  $t = 1,67591$ . Berdasarkan hasil pengelolaan data nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,924 > 1,67591$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sedangkan melihat angka signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  maka variabel Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan memiliki hubungan secara signifikan dengan Pendapatan Usaha Mikro pada masyarakat Kecamatan Pamarayan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dari Persamaan garis regresi hubungan Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan dengan Pendapatan Usaha Mikro dapat dinyatakan dengan  $Y = -8,391 + 1,086x$ . Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien x sebesar 1,086 yang berarti apabila Pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan (x) meningkat 1 satuan maka Pendapatan Usaha Mikro (y) akan meningkat 1,086 poin.

## REFERENSI

- Arum S.L. (2012). Peranan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM Mandiri Pedesaan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga di desa Gelung kecamatan Paron kabupaten Ngawi. *Jurnal Unesa Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012: 4*
- Hidayati N., Widyastutik & Wiliasih R. The Factors Affecting the Amount of Islamic Microfinance and Its Impact on Customer's Turnover: Case Study KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Koja Jakarta. *Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2, No. 1, ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363: 49*
- Kusmeiran Y.H, Sri Budhi M.K. (2014). Efektivitas dan dampak Program SPP terhadap pendapatan dan jam kerja anggota kelompok SPP di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. *E-jurnal ekonomi pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 1, Januari 2014: 29*
- Nihayah ZA. (2015). Pengaruh program simpan pinjam kelompok perempuan terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan poverty reduction dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangilan, Tuban). *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.5, No. 2 Tahun 2015 : 2*
- Pedoman Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2012: 20
- Sekaran U. (2002), *Research Methods for Bussiness: Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi 4. Jilid 1.* Jakarta: Salemba Empat.: 23
- Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabet
- Sumarno.N.T (2013), *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial "Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Tahun 2013"*. Haniniditia Yogyakarta: 31
- Syukri M, dkk. (2013). Penelitian Studi Kualitatif Dampak PNPM Pedesaan di Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tenggara, Jakarta, Semeru.:4

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diakses pada tanggal 2 Desember 2016